1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12

2 0 1 7
SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

·u	Taliggai :															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	12	13	14	15	16
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2 6	3 7	28	29	30	31	

Suara Jateng Pos Jawa Pos Media Indonesia Wawasan

Imbun Metro Jateng Jateng Republika Kompas Media Online

Wilayah Berita: BPK Jateng

Halaman 6

Bank Jateng Mitigasi Risiko Penyimpangan



SOSIALISASI PENGADAAN: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Rahadi Widayanto (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jateng Hery Subowo didampingi Direktur Operasional dan Unit Usaha Syariah Hanawijaya di Kantor Pusat Bank Jateng, Semarang, Rabu (25/10). (74)

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

SEMARANG - Bank Jateng terus berupaya untuk memitigasi risiko penyimpangan yang mungkin terjadi saat kegiatan pengadaan barang/jasa. Kendati dinilai sudah cukup memiliki standard operating procedure (SOP) internal cukup baik, namun masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng untuk penyempurnaan akan ditindaklanjuti supaya risiko penyimpangan bisa ditekan.

"SOP internal ternyata masih perlu penyempurnaan walau disampaikan Bank Jateng sudah melakukannya sangat baik. Secara umum disampaikan realisasinya sudah berjalan dengan baik dan kita akan lebih sempurnakan lagi sesuai arahan BPK," papar Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Rahadi Widayanto usai "Sosialisasi Isu Strategis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa" di Gedung Bank Jateng Jalan Pemuda, Rabu (25/10).

Dengan sosialisasi tersebut, seluruh Pemimpin Unit Kerja terutama yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar tentang proses pengadaan. Selain itu unit kerja juga bisa melaksanakan kegiatan pengadaan dengan benar sesuai ketentuan dan risiko hukum

yang mungkin timbul dari kegiatan pengadaan barang/jasa ini bisa dimitigasi sejak awal.

Menurut Widayanto, kegiatan ini sangat penting karena berdasarkan hasil audit baik yang dilaksanakan oleh eksternal maupun internal, masih dijumpai adanya unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu penyebabnya antara lain masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pejabat atau petugas mengenai proses pengadaan yang benar.

"Proses pengadaan barang/jasa seringkali menarik sebagai objek audit sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan, bahkan bisa menjadi masalah hukum dan sampai ke

aparat penegak hukum," imbuhnya.

Bahan Pembelajaran

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo menyampaikan, pihaknya pernah melakukan pemeriksaan di Bank Jateng khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil analisis terhadap SOP di Bank Jateng juga diinformasikan kembali kepada para peserta sebagai bahan pembelajaran supaya hal-hal yang berisiko itu dipelajari kembali.

"Dari aspek internal Bank Jateng tentu harus memerhatikan peraturan internal tentang pedoman pengaturan barang dan jasa. Jika itu saja dipatuhi maka sudah memitigasi penyimpangan yang mungkin terjadi," kata Hery. (J14-74)